

## **Analisis Peran Hindu Rights Action Force (HINDRAF) Dalam Upaya Rekognisi Identitas Diaspora India di Malaysia**

**Susila Wati<sup>1</sup>, Syaiful Anam<sup>1</sup>, Ahmad Mubarak Munir<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
[shiningsusy1453@gmail.com](mailto:shiningsusy1453@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*In the early part of 2008, a major political upset was pulled off in Malaysia when the ruling coalition, Barisan Nasional (National Front), lost its almost sixty years long-held parliamentary majority after the general elections. It is The Hindu Rights Action Force (HINDRAF) came out from a series of controversial actions perceived by the Malaysian Indian community as discriminatory such as the errant destruction of Hindu temples and the body-snatching cases of Tamil Hindus, thought to have been converted to Islam, as well as the state of poverty confronted by the Tamil Hindu community in Malaysia. The 2007 rally event had an overwhelming impact internationally, drawing attention to the plight of Malaysian Tamil Hindus. However, the aim of this study will demonstrate that by the subsequent two general Malaysian elections of 2013 and 2018, the Tamil Hindus, as represented by HINDRAF, had not achieved their goals. Enduring heavy-handed treatment by the Malaysian authorities previously and troubled by internal strife and leadership issues within HINDRAF, this movement of Tamil Hindus in Malaysia stand diluted and divided. The result showed that after the 14<sup>th</sup> general election of 2018, it seems that the leadership has also accepted a compromised position. Malay-Muslim majoritarianism remains dominant and the "New Malaysia" appears less than that heralded in the early days of the new Pakatan Harapan government. This research uses qualitative methods.*

**Keywords:** *Indian Malaysian Minority, Discrimination, HINDRAF, Identity of Recognition, Malaysia.*

### **ABSTRAK**

Pada awal tahun 2008, gejolak politik besar terjadi di Malaysia ketika koalisi yang berkuasa selama enam puluh tahun, Barisan Nasional tumbang pasca pemilihan umum. Kemunculan Hindu Rights Action Force (HINDRAF) sebagai gerakan kontroversial menjadi akar pergolakan ini yang oleh masyarakat India Malaysia dianggap telah mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti kasus perusakan kuil-kuil Hindu dan kasus-kasus penculikan orang-orang Hindu Tamil, yang diduga telah masuk Islam, serta kemiskinan yang dihadapi oleh komunitas Hindu Tamil di Malaysia. Tidak dapat disangkal bahwa peristiwa unjuk rasa tahun 2007 memiliki dampak yang luar biasa secara internasional dalam menggambarkan penderitaan umat Hindu Tamil Malaysia. Namun, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan hasil dua pemilihan umum Malaysia berikutnya yakni tahun 2013 dan 2018, ketika suara Hindu Tamil diwakili oleh HINDRAF belum mencapai tujuan mereka. Mengalami perlakuan berat dari pihak berwenang Malaysia dan terdistruksi oleh perselisihan internal kepemimpinan HINDRAF, gerakan Hindu Tamil kemudian lemah dan terpecah. Pasca pemilu tahun ke-14 tahun 2018 ketika kepemimpinan HINDRAF juga menerima kompromi kekuasaan. Mayoritas Muslim-Malaysia tetap dominan dan nampaknya slogan "Malaysia Baru" menjadi realita yang sangat jauh dari yang digembar-gemborkan pada masa awal Pemerintahan Pakatan Harapan. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Minoritas India Malaysia, Diskriminasi, HINDRAF, Rekognisi Identitas, Malaysia.

## PENDAHULUAN

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Pemerintah Malaysia telah melihat hubungan antar etnis merupakan tantangan nyata bagi stabilitas sosial Malaysia di masa depan. Pada awal tahun 1970, Perdana Menteri keempat Mahathir Mohamad dalam bukunya "*The Malay Dilemma*" mengklaim bahwa meskipun ada sejumlah toleransi dan akomodasi, kerukunan di Malaysia tidak akan pernah menjadi nyata. Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri kelima Malaysia pada akhir kepemimpinannya juga menyatakan bahwa persatuan nasional adalah tantangan terbesar yang akan dihadapi penggantinya – Najib Abdul Razak, yang menjabat pada bulan April tahun 2009 dan bahkan kemudian mengemukakan kemundurannya sebagai salah satu upaya dalam meredakan ketegangan antar etnis kala itu (Fong & Ishak, 2014). Sejalan dengan pengakuan kemerdekaan, Malaysia melalui adopsi konstitusi federal tahun 1957 telah membawa nasionalisme Melayu bergeser menjadi defensif atas paradigma resmi negara-agama. Konstitusi telah mengistimewakan orang Melayu atas kelompok etnis lain dengan menjamin kedudukan khusus orang Melayu yang tertuang dalam pasal 153, bahasa Melayu sebagai bahasa nasional pada pasal 152, dan Islam sebagai agama nasional dalam Pasal 3 konstitusi Malaysia. Lebih dari itu, pada pasal 160, konstitusi mendefinisikan orang Melayu sebagai orang yang memeluk agama Islam, biasanya berbicara bahasa Melayu dan mengikuti adat Melayu (Kaur, 2018). Fakta ini telah meletakkan parameter dalam lingkungan politik, ekonomi dan sosial Malaysia yang akhirnya menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi kerukunan berbangsa di Malaysia dengan latar belakang etnis yang beragam.

Puncaknya ketika pada tahun 1969, ketika konflik antara Etnis Tionghoa dengan Etnis Melayu pecah karena terjadinya ketimpangan antara kedua etnis, dimana etnis pribumi (Melayu) tidak terima atas dominasi Etnis Tionghoa di sektor perekonomian. Pada saat yang sama, orang-orang India-Malaysia yang sebagian besar merupakan Etnis Tamil, terutama yang berada pada area perkebunan negara, berpendapat bahwa mereka telah menjadi kelompok yang terdiskreditkan, baik dalam segi ekonomi, sosial maupun politik (*Muslimah*, 2017). Alhasil, India-Malaysia telah digambarkan sebagai minoritas yang terpinggirkan yang terletak di antara hegemoni politik Melayu dan dominasi ekonomi Tionghoa Malaysia (Cangià, 2014). Kemunculan *Rally Hindu Right Action Force* (HINDRAF) pada tanggal 25 November 2007 telah menarik perhatian banyak orang serta media internasional karena muncul sebagai gerakan minoritas India terbesar sejak tahun 1930-1940. Fenomena ini merupakan gerakan sosial paling *impressive* dari komunitas India yang sarat dengan muatan penderitaan komunitas etnis yang terpinggirkan selama 50 tahun terakhir (Kaur, 2011). Fenomena ini kemudian digembar-gemborkan menjadi getaran positif bangkitnya komunitas minoritas India Malaysia.

HINDRAF sendiri berasal dari koalisi organisasi non-pemerintah Indian Hindu yang sebagian besar merupakan Etnis Tamil, dipimpin oleh Waythamoorthy yang merupakan pengacara beretnis Tamil. Gerakan ini muncul dari serangkaian tindakan dan kebijakan kontroversial yang dianggap diskriminatif oleh komunitas India-Malaysia yang dipicu oleh tiga jenis kontroversi suku-agama di tahun 2000-an yang menyebabkan tuntutan serius berbasis etnis-agama dalam rangka mempertanyakan status hukum dan kebebasan beragama mereka.

Dalam tuntutananya, HINDRAF mengajukan petisi dengan 100.000 tanda tangan yang meminta Ratu Inggris yang menuntut tanggung jawab atas penelantaran orang-orang India pasca kolonialisme dengan kompensasi sebesar \$4 triliun atas klaim *apartheid* yang terjadi atas mereka (Singh, 2014). Pada saat yang sama HINDRAF juga menuntut agar pasal 153 dari Konstitusi Malaysia, yang mengakui peran dan status khusus bahasa dan budaya Melayu sebagai faktor penentu identitas Malaysia untuk dihentikan dan pemerintah Malaysia harus menyatakan dengan tegas bahwa Malaysia masih merupakan negara demokrasi sekuler. Kekuatan di balik demonstrasi ini sangat besar sehingga mampu menciptakan dampak berskala internasional dalam menarik perhatian umat Hindu di seluruh dunia. Lebih lanjut, dikarenakan *Malayan Indian Congress* (MIC) yang merupakan satu-satunya partai politik yang menampung aspirasi orang-orang India di Malaysia tidak memiliki kekuatan politik untuk menyelesaikan kontroversi etnis-agama ini, HINDRAF telah berhasil mendapatkan dukungan dari kelas menengah India perkotaan dan para pemimpin India di partai-partai oposisi terutama dukungan dari non-Melayu Cina untuk bersatu dengan India. Alhasil, gerakan ini kemudian mempengaruhi pemilihan umum Malaysia pada tahun 2008, ketika pemerintah Barisan Nasional kehilangan mayoritas dua pertiga suara di Parlemen. Kemenangan ini selanjutnya telah membawa HINDRAF menjadi kelompok legal pada tahun 2013 yang selanjutnya aktif memainkan peran khusus dalam membawa aspirasi komunitas Indian Malaysia menuju garis depan lanskap politik Malaysia.

Walau demikian, kemenangan yang diperoleh oposisi partai Pakatan Rakyat (PR) pada pemilu tahun 2008 yang diduga hasil dari simpatik proses *HINDRAF Rally* 2007 tak serta merta membuat kehidupan komunitas India jauh dari konflik. Meski pada faktanya HINDRAF sangat lihai dalam memobilisasi dukungan suara orang-orang India pada dua periode berikutnya yakni pada tahun 2013 dan 2018. Karena selama beberapa tahun terakhir sejak aksi protes HINDRAF, sejumlah ketegangan etnis masih muncul di antara masyarakat Melayu-Tamil bahkan dalam hal yang sederhana seperti kontroversi modul dengan konten “ketegangan etnis” pada Perguruan Tinggi, masalah pendatang, hingga perselisihan penggunaan kata “Allah” (Fong & Ishak, 2014). Sehingga penulis tertarik dalam mengurai sejauh mana peran HINDRAF dalam proses rekognisi identitas diaspora India terutama yang begitu nampak melalui euforia lanskap pemilihan umum Malaysia khususnya pasca keruntuhan perolehan suara Barisan Nasional pada pemilu tahun 2008 yang lebih cenderung pada proses dalam mendapatkan legitimasi politik yang harapannya menjadi sumbangsih khazanah baru serta mendukung penelitian-penelitian serupa dalam keilmuan hubungan internasional.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Adapun sumber-sumber referensi untuk mendukung dan memperkuat data serta analisis skripsi ini, penulis menggunakan beberapa buku, literatur jurnal, dan artikel dengan penelitian seputar diaspora India Malaysia, HINDRAF, dan minoritas diantaranya: Dalam sebuah tesis yang ditulis oleh Arunajeet Kaur pada Oktober 2011 dengan tema “*From Independence to HINDRAF The Malaysian Indian Community and The Negotiation for Minority Rights*”. Dalam tulisan ini penulis secara terperinci menyebutkan bagaimana komunitas India Malaysia menjadi pihak yang termarjinalkan dan akhirnya menjadi faktor yang mendorong adanya protes masal berbasis etnis.

Penulis menyebutkan bahwa komunitas India sebagian besar terkonsentrasi di negara bagian Selangor, Perak dan Johor. Pada tahun 2000, persentase terbesar Orang India dengan 12,8% memperoleh pendapatan kotor rumah tangga bulanan sebesar RM 2725, hanya 5% yang memperoleh RM 3456. Juga pada tahun 2000, kebanyakan orang-orang India berpendidikan sampai sekolah dasar (33,10%) atau sekolah menengah pertama (28,20%). Sebanyak 7,15% telah lulus dari universitas dan perguruan tinggi lainnya. Hal ini menjelaskan mengapa hanya 10,1% orang India dipekerjakan di bidang profesional ketika mereka sebagian besar mendominasi produksi (39,4%), pertanian (15,1%) dan sektor jasa (12,1%). Namun statistik yang paling mengejutkan adalah persentase narapidana dan kriminalitas, sebanyak 9% Indian Malaysia kecanduan narkoba, 19,7% terjerat hukuman pembunuhan dan 9,5% kejahatan remaja adalah orang India. Sebanyak 13,37% narapidana di Malaysia adalah orang India.

Appadurai dan Dass yang merupakan pengamat politik mengatakan bahwa orang India sebagai minoritas bertahan dalam marginalisasi politik dan ekonomi di Malaysia dikarenakan jumlah mereka tidak menjamin representasi mereka yang signifikan dan apa yang diperjuangkan oleh MIC dianggap belum efektif membuat masyarakat India dalam kondisi yang baik khususnya dalam hal persentase ekuitas ekonomi negara. Angka presentase yang sama dijelaskan juga dalam artikel *Diaspora Studies* yang ditulis oleh Amit Singh yang berjudul "*Indian Diasporas as a Factor in India-Malaysia Realltion*" yang di publikasikan pada Mei 2014 menyebutkan bahwa minoritas India Malaysia tertinggal dalam banyak indikator sosial-ekonomi dan tetap lumpuh. Pada tahun itu, sebanyak 40% dari kejahatan berat di Malaysia dilakukan oleh orang-orang India Malaysia, sebanyak 38% basis geng aktif dengan jumlah 1500 anggota aktif adalah orang India Malaysia. Mereka juga merupakan jumlah tertinggi yang ditahan berdasarkan peraturan darurat. Lebih dari itu, orang India Malaysia memiliki tingkat bunuh diri tertinggi dan menyumbang 20% dari pelecehan anak dan istri, sebanyak 14% presentase anak-anak nakal dan 15% diantaranya adalah penghuni liar yang tersebar di Kota Kuala Lumpur. Sehingga dalam hal ini, kelahiran dan kebangkitan HINDRAF tidak lain merupakan reaksi atas kondisi sosial dan ekonomi sulit yang sudah terkonstruksi atas mereka sepanjang sejarah sejak ditematkannya nenek moyang mereka oleh Inggris pada kebun-kebun karet dan menjadi komunitas buruh kasar yang terpinggirkan. Fakta ini pada masa mendatang telah memunculkan generasi yang tidak sehat dan terciptanya marginalisasi lebih luas.

Pada dua penelitian di atas, penulis menggunakan sisi kaca mata yang sama dalam menjelaskan bagaimana dan apa saja bentuk dari marginalisasi komunitas India Malaysia baik pada masa kolonial dan pasca kolonial. Sedangkan perbedaannya adalah penulis tidak hanya berfokus kepada bentuk marginalisasi komunitas India yang kemudian memunculkan gerakan HINDRAF berbasis etnis namun juga menambahkan variabel lain yakni melihat sejauh mana mobilisasi politik HINDRAF pada dua periode pemilihan umum Malaysia sehingga dapat dilihat peran yang signifikan terhadap pergerakan HINDRAF dalam kancah perpolitikan Malaysia.

Adapun bagaimana kemunculan HINDRAF dalam membingkai tuntutan-tuntutan kesetaraan dan pengakuan dapat terakomodir dengan baik, penulis mengkomparasi beberapa penelitian serupa diantaranya adalah oleh Flavia Canga dengan judul "*The Hindu Rights Action Force and The Definition of The Indian*

*Community in Malaysia*” yang dilakukan pada bulan Juli 2008. Dalam makalah ini penulis menguraikan penelitian primer dalam memperoleh data-data ketika ia mengunjungi kota-kota di Georgetown (Pulau Penang) dan Ipoh (Perak, Semenanjung Malaysia) untuk melakukan wawancara kepada koordinator nasional dan beberapa ahli serta pendukung yang berpartisipasi dengan gerakan HINDRAF. Ia juga menyampaikan data tambahan konkrit yang didapatkan dari kutipan blog dan diskusi-diskusi dari banyak jaringan sosial media orang-orang India Tamil, karena hal ini dinilai penting dalam melacak historis perkembangan sosialnya secara primer dan murni.

Penulis menyatakan diskusi-diskusi yang dikenal dengan sebutan *Circle of Struggle* yang merupakan bagian yang integral dari proses tercapainya lanskap politik HINDRAF. Semua wacana dan kutipan diskusi dari media ini telah dikumpulkan sejak tahun 2007 yang kemudian menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat India di Malaysia. Lebih lanjut penulis mengatakan semua data ini merupakan manifestasi dari sebuah proses tertentu yang sarat dengan wacana identitas. Permasalahan yang sangat kompleks dibalut heterogenitas yang sangat sensitif memunculkan rasa kesatuan dan kesamaan untuk berjuang dalam gerakan kesamaan etnis. Meski begitu, kebangkitan yang diserukan HINDRAF bertujuan untuk memperkuat rasa identitas dalam rangka memperjuangkan berbagai hak sosio-kultural, ekonomi, dan politik. HINDRAF menggunakan strategi memunculkan pecahan-pecahan kelas dalam masyarakat dan mencoba memperluas ruang lingkup yang awalnya dengan cara menyilangkan divisi sosial budaya menjadi kekuatan berbasis politik etnis dengan menggarisbawahi hak-hak istimewa politik dan ekonomi dari orang-orang India. Hal yang lebih penting adalah meskipun MIC merupakan perwakilan orang-orang India di pemerintahan, HINDRAF justru telah memisahkan diri dan meletakkan mosi tidak percaya karena MIC telah diposisikan sebagai pihak yang telah mengkhianati kepentingan kelompok India. Bahkan HINDRAF telah membuat wacana resmi terhadap penghianatan ini demi memperkuat rasa solidaritas diantara kelompok-kelompok yang dianggap telah diperdebatkan dan tidak terwakili. Sebagai hasilnya, membuat persatuan yang solid diantara komunitas Hindu Indian telah menjadi masalah khusus yang terus diperjuangkan.

Bahkan dalam sebuah jurnal internasional yang ditulis oleh Lai Fong dengan tema “*Framing Inter-Ethnic Conflict in Malaysia: Comparative Analysis of Newspaper Coverage on Hindu Rights Action Force (HINDRAF)*” justru menemukan temuan yang menarik hingga akhirnya mendulang banyak perhatian publik. Sebanyak 1.205 artikel tentang HINDRAF dikumpulkan dari empat surat kabar. *Sin Chew Daily* menyumbang item berita terbanyak (513 artikel), disusul Malaysia Kini (342 artikel), *The Star* (185 artikel), dan Utusan Malaysia (165 artikel). Semua surat kabar memiliki sebagian besar liputannya dalam bentuk berita langsung. Rata-rata Malaysia Kini menerbitkan jumlah kata terbanyak pada HINDRAF (610 kata), diikuti oleh *Sin Chew Daily* (406 kata), Utusan Malaysia (339 kata) dan *The Star* (316 kata).

Dalam sebuah artikel yang lain dengan tema “*The HINDRAF Saga: Media and Citizenship in Malaysia*” yang ditulis oleh Susan Leong pada tahun 2009 juga memaparkan tentang bagaimana pengaruh mobilisasi media massa dengan perkembangan terbentuknya opini umum di masyarakat. Penulis menyebutkan bahwa hubungan antara media, nasionalisme, dan praktek kewarganegaraan sudah sangat lumrah dalam banyak literatur. Secara umum penulis berpendapat bahwa struktur,

produksi, dan konsumsi media adalah produk dan prasyarat bagi bangsa dan kewarganegaraan. HINDRAF melalui penggunaan media baru sebagai arus utama telah menjadi rujukan pembaharuan tentang apa yang disebut sebagai hak konstitusional, kebebasan pasca kolonialisme, diaspora, dan transnasionalisme. HINDRAF telah berhasil menarik bukan hanya bagi diaspora India tetapi juga untuk trans etnis dengan jangkauan yang lebih luas melampaui komunitas nasional. Bermula dari hanya etnis minoritas yang kecil bertransformasi menjadi gerakan yang terampil dalam memposisikan tuntutan mereka sehingga memenangkan suara dari sektor-sektor komunitas nasional dan internasional.

Argumen yang sama dinarasikan kembali oleh Asha Rathina Pandi dalam disertasinya yang berjudul "*Blogging and Political Mobilization Among Minority Indians in Malaysia*". Penulis menyebutkan bagaimana karakteristik blog dari prespektif non-Barat memiliki struktur jaringan yang cocok untuk komunikasi dan koordinasi dalam mengatur aksi kolektif dan mobilisasi politik. Penulis membangun kerangka teoritis yang menunjukkan hubungan antara ruang aktivis dan aktor kolektif dalam mengelola mobilisasi politik. Sehubungan dengan itu, unjuk rasa HINDRAF pada November 2007 telah menyebabkan kekalahan suara pada *Malaysian Indian Congress* (MIC) pada pemilihan umum 2008 sehingga kajian penulis dianggap telah mengungkap dinamisme yang terlibat dalam penggunaan blog sebagai langkah mobilisasi politik di kalangan minoritas orang-orang India di Malaysia. Pada kasus ini, unjuk rasa HINDRAF telah memainkan peran instrumental yang kemudian mengakibatkan orang-orang India memilih oposisi dan menolak MIC sebagai pihak yang sebelumnya mengantongi suara-suara diaspora India.

Dalam artikelnya yang lain Asha Rathina Pandi yang berjudul "*Insurgent Space in Malaysia: HINDRAF movement, new media and minority Indians*". Penulis menjelaskan bahwa pada dasarnya, media yang dikendalikan pemerintah tidaklah bebas dari regulasi negara. Pemerintah telah memberikan ruang kebebasan untuk berbicara namun tidak untuk berkumpul. Media dan jaringan komunikasi memainkan peran yang penting dalam meledaknya unjuk rasa 2007 dan bagaimana opini perubahan arah masa berubah menjadi satu suara. Penulis menyebutkan fenomena ini sebagai bentuk baru dari kebangkitan dunia komunikasi dan teknologi. Komunikasi jaringan horizontal dengan situs *blog*, *youtube*, berita, media tradisional, penguas suara, media cetak dan segala jenis telepon seluler. Gerakan lain juga dilakukan oleh beberapa *blogger* India yang memainkan peran mereka dalam membuat agenda serta menciptakan kesadaran pentingnya mereka bersatu pada satu suara dengan mengundang orang lain untuk bergabung dengan menautkan ke situs web HINDRAF dan menyebarkan berita dan informasi terkait. Pembaca kemudian didorong untuk menyebarkan informasi tersebut melalui fungsi web aplikasi seperti *Yahoo*, *Fly Web*, *Windows Live*, *Google Bookmarks*, *Dig Technorati* dan *Email*. Pada sisi lain, dengan penyebutan media tradisional yang dipelopori oleh masyarakat langsung bertindak sebagai jurnalis dengan menyebarkan berita melalui video dan gambar melalui pesan singkat dan seremonial forum dan kemudian berhasil membuat kesepakatan bersama yang kemudian diserahkan pada Kedutaan Inggris pada saat itu. Berikutnya undangan pers internasional juga berdatangan secara online yang menambah radar dan kekuatan dari opini yang menjadi tuntutan banyak orang saat itu. Inilah serangkaian

bagaimana media telah berhasil menjadi jalan bagi bersatunya opini umum yang sangat berpengaruh pada pemilu Malaysia di tahun setelahnya.

Perbedaan sumber di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sumber tersebut banyak berfokus kepada faktor-faktor  $x$  yang menyebabkan berhasilnya gerakan tuntutan HINDRAF dalam mendulang suara sehingga pada pemilu tahun 2008 dimenangkan oposisi dan pada tahun 2013 Barisan Nasional harus menempuh cara-cara yang tidak biasa untuk memenangkan suara simpatisan dalam pemilu. Dengan kata lain, pada penelitian penulis variabel tahun ditambahkan hingga pada periode pemilu tahun 2018.

Adapun dalam hal sejauh mana pengaruh *HINDRAF Rally 2007* terhadap pemilu setelahnya, penulis membuat perbandingan dengan beberapa jurnal lain diantaranya adalah ditulis oleh Thaatchayini Kananatu yang berjudul "*The Politico-Legal Mobilisation of Ethnic Indians Before Malaysia's 2018 Election*". Dalam jurnal ini penulis menerangkan bahwa keberhasilan HINDRAF dalam mengorganisir unjuk rasa tahun 2007 juga aksi langsung selanjutnya dapat dijelaskan oleh keberhasilannya dalam menyatukan baik kelas bawah India dan kelas menengah India perkotaan dengan orang India sebagai identitas mobilisasi yang lebih luas. HINDRAF bergeser dari fokus awalnya pada identitas etno-religius dan hak-hak umat Hindu menjadi penggabungan beberapa masalah dibawah identitas formal orang India. Diluar kontroversi suku-agama, HINDRAF menekankan terutama masalah sosial-ekonomi kelas bawah India dalam 18 poin memorandum pada unjuk rasa tahun 2007 yang akhirnya mendapatkan pengaruh suara signifikan pada pemilihan umum Malaysia pada tahun 2008.

Pada makalah lain dengan judul "*Race, Class and Politics in Peninsular Malaysia: The General Election of 2008*" yang ditulis oleh Lian Kwen Fee dan Jayanath Appudurai dari Universitas Singapura yang diterbitkan pada 25 Februari 2011 telah menggaris bawahi mengenai kekalahan suara Barisan Nasional oleh koalisi, apakah menandakan bahwa hal ini merupakan hancurnya sistem politik berbasis pluralisme etnis atau tidak. Pada pemilu tahun 2008, koalisi oposisi Pakatan Rakyat memperoleh 61 kursi disamping 19 kursi yang sudah dimilikinya dari total 166 kursi parlemen di Semenanjung Malaysia. Untuk pertama kalinya dalam politik elektoral negara itu, ayunan suara Melayu, China, dan India ke oposisi merupakan gabungan lintas etnis. Penulis menyebutkan kemenangan ini menjadi perubahan spektakuler terhadap orang-orang India dan merupakan titik kekecewaan etnis India dari penderitaan marjinalisasi ekonomi dan politik sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Pada pemilu 2008, kebencian non-Melayu terhadap kebijakan pro-bumiputra dan ketidakpuasan Melayu pada hak istimewa elitis di UMNO telah tumbuh sedemikian rupa sehingga sebagian besar pemilih Melayu dan sebagian besar pemilih non-Melayu tidak dapat lagi mentolerir hal tersebut dari pemerintah BN yang telah berkuasa sejak 1973.

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Robert K. Arakaki yang dipublish oleh University of Hawaii at Manoa dengan judul "*2008 Malaysian Election: The End of Malaysia's Ethnic Nationalism?*" menerangkan bahwa dalam pemilu tahun 2008, BN mengalami penurunan suara terhadap koalisi yang terdiri dari partai oposisi lama dan baru: PAS Islam, DAP Cina, dan Partai Keadilan Baru. Bahkan MIC dari komunitas India yang tidak memiliki saingan telah mengalami pengurangan suara sebanyak dua pertiga dari kursi partai. Penulis menyebutkan bahwa hasil pemilu pada tahun ini

ditafsirkan sebagai kemungkinan terurainya strategi nasionalisme etnis Malaysia. Mayoritas orang India merasa kecewa dengan politik berbasis etnis MIC dan BN, dan sebaliknya menginginkan sistem yang akan memberi mereka kesetaraan. Hal ini menandakan ditinggalnya nasionalisme etnis yang selama ini berkembang dan menjadi arah gerakan dari orang-orang India.

Kemudian dalam jurnal yang ditulis oleh Edmund Terence Gomez bersama temannya Pomalar N. Alagappan dengan tema *“Failed Broker State: Malaysia’s Indian Poor and The Fall Of UMNO”* menjelaskan bagaimana Barisan Nasional yang berkuasa selama puluhan tahun telah kehilangan suara pasca *Rally HINDRAF 2007*. Hal ini membuat Najib Razak mengambil alih jabatan perdana menteri pada tahun 2009 dan menggambarkan dirinya sebagai “negara broker” bagi orang India. Komite kabinet dibentuk di Departemen Perdana Menteri untuk fokus pada masalah sosial-ekonomi masyarakat, dan Sekretariat Khusus untuk Pemberdayaan Pengusaha India didirikan. Wadah ini adalah perantara yang akan menghubungkan orang India dengan lembaga publik yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bagi masyarakat miskin dan penganggur untuk memulai skala kecil *start-up*. Lebih mengejutkan lagi bahwa Najib secara terbuka menekankan intervensi langsungnya untuk membantu komunitas ini, dalam prosesnya merebut peran tradisional yang dimainkan oleh MIC, yang pengaruhnya semakin berkurang karena perselisihan internal. Najib kemudian memfokuskan targetnya pada lembaga non-pemerintah yang berbasis di India (LSM) dan kemudian bebas disalurkan untuk didistribusikan kepada kaum miskin India.

Pada sumber terakhir penulis memuat jurnal dengan judul *“The Hindu Rights Action Force and the Malaysian Indian Minority After The 2018 General Election in Malaysia”* yang ditulis oleh Arunajeet Kaur menjelaskan tentang optimisme HINDRAF dalam memperjuangkan dukungan dan simpatisan kepada kelompok India dan membelokkan masa dari pendukung Melayu pasca kemenangannya pada pemilihan umum tahun 2008. Pada bagian lain penulis menjelaskan bagaimana HINDRAF menggiring opini dengan menyoroti marjinalisasi politik, ekonomi, dan sosial yang mendera komunitas India adalah semata-mata pada dasarnya adalah masalah sentimen agama. Dikuatkan dengan fakta meningkatnya islamisasi dalam masyarakat Malaysia yang kemudian memicu pembongkaran kuil Hindu yang “salah” oleh pemerintah Malaysia.

Semua sumber di atas menyuguhkan variabel yang sama dengan penulis yakni bagaimana sebuah gerakan sosial berhasil mempengaruhi masa untuk mengakomodir tuntutan-tuntutannya khususnya pada jurnal terakhir yang menguraikan optimisme perjuangan HINDRAF dalam mengambil peran pada pemilu tahun 2013 dan 2018, perbedaannya adalah Kaur menyebutkan bahwa pada kedua periode itu HINDRAF telah gagal dalam mencapai tujuan mereka dikarenakan perselisihan internal serta tawar-menawar kekuasaan. Meski begitu, dalam penelitian skripsi ini penulis masih menyematkan hasil yang berbeda dimana kegagalan akhir yang dicapai HINDRAF sesungguhnya telah memiakan mobilisasinya dengan cukup serius dan lincah sehingga berawal dari kelompok perkumpulan ilegal telah bertansformasi menjadi badan partai politik dengan wajah yang berbeda.

## **METODE PENELITIAN**



Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena terkait fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

## KERANGKA PEMIKIRAN

Kacamata yang digunakan penulis dalam menjelaskan kemunculan gerakan HINDRAF adalah teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*). Adapun dalam mengurai sejauh mana peran rekognisi diaspora India Malaysia, penulis menggunakan teori politik rekognisi. Adapun teori gerakan sosial baru didefinisikan sebagai gerakan dengan individu-individu yang berpikiran rasional, waras, dan tujuan yang diperhitungkan secara matang. Gerakan sosial baru disebutkan mulai muncul memasuki tahun 1970-an di Eropa dan Amerika. Pada masyarakat kontemporer, teori ini memiliki citra baru dan tampilan yang lebih luas serta rumit baik dalam bentuk, tipe, dan model gerakan sosial sehingga lebih cenderung bersifat makro daripada mikro dalam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi. *HINDRAF Rally 2007* merupakan sebuah gerakan sosial yang dikategorikan sebagai *New Social Movement*. Hal ini dapat dilihat dari munculnya aksi masa dengan latar belakang etnis yang termarjinalkan hingga memiliki tujuan yang jelas dalam proses membingkai kembali pengakuan identitas atas kebijakan kontroversial pemerintah Malaysia terhadap minoritas India. Sedangkan berdiamnya tiga etnis besar yakni Melayu, Indian, dan Tionghoa telah menjadikan Malaysia sebagai negara multikultural yang pada akhirnya membawa Malaysia pada tantangan bagaimana menciptakan kestabilan nasional berbagai etnis di masa depan.

Menurut Taylor, inti terdalam dari wacana multikulturalisme adalah perjuangan dalam mendapatkan pengakuan (*struggle for recognition*). Perjuangan inilah yang menjadi dorongan dasar dari begitu banyak gerakan politik yang muncul pada pertengahan sampai akhir abad ke-20 seperti feminisme, gerakan kaum gay, dan juga muncul di dalam perjuangan kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas mereka dari penjajahan kelompok mayoritas, baik dalam hal agama maupun etnis (Taylor, 2004). Di dalam politik pengakuan, orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda dari budaya minoritas ingin mempertahankan identitasnya yang unik. Mereka tidak hanya ingin supaya identitasnya ada, tetapi supaya identitas tersebut bisa berkembang secara dinamis dengan identitas-identitas lainnya di dalam masyarakat. Dalam arti ini identitas diri seseorang adalah sesuatu yang sangat penting, karena di dalamnya terdapat pemahaman tentang siapa dan dari mana mereka. Dapat juga dikatakan bahwa identitas adalah hakikat fundamental dari manusia itu sendiri (Wattimena, 2011).

Rangkaian perjuangan awal ini merupakan sebuah upaya etnis India dengan tujuan dapat terciptanya keadaan yang harmonis di antara mayoritas Melayu serta membangun integrasi sosial secara utuh. Namun demikian, teori Taylor menyebutkan asumsi bahwa berkembangnya masyarakat adat sebagai entitas yang berbeda dan menentukan nasib sendiri adalah tergantung pada kemampuan mereka, pengakuan budaya, dan akomodasi institusional negara (Coulthard, 2007). Hal ini berarti, segala

upaya rekognisi Indian Malaysia tergantung pada *background culture* dari negara dan sejauh mana institusi negara tempat mereka hidup dapat mentolerir perjuangan pengakuan. Dalam hal ini penulis memfokuskan proses rekognisi HINDRAF sebagai representative dari komunitas India Malaysia hubungannya pada proses mobilisasi politik pada pemilu sejak munculnya gerakan *HINDRAF Rally 2007* terhadap hasil pemilu tahun 2013 dan 2018 di Malaysia. Penulis akan menguraikan sejauh mana peran serta partisipasi dari HINDRAF dalam membawa tuntutan minoritas India Malaysia sebagai negara konstitusi Melayu yang selama beberapa dekade terdistraksi sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Rally HINDRAF* yang terjadi pada 25 November 2007 telah menarik perhatian publik terutama media global dikarenakan peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya pada komunitas India Malaysia. Fenomena ini merupakan gerakan sosial paling *impressive* dari komunitas India yang sarat dengan muatan penderitaan komunitas etnis yang terpinggirkan selama 50 tahun terakhir (Kaur, 2011). Sebanyak 8000 lebih masa berkumpul di jantung kota Kuala Lumpur untuk menyerahkan petisi kepada Komisi Tinggi Inggris yang ditujukan kepada penasehat ratu dalam mewakili orang India Malaysia terhadap gugatannya terhadap pemerintah Inggris atas penderitaan mereka sebagai minoritas yang terpinggirkan selama 50 tahun terakhir sejak kemerdekaan dengan meminta kompensasi sebesar satu juta *pound sterling* untuk setiap satu dari dua juta orang India. Hal ini dijadikan klaim atas gagalnya pemerintahan Inggris pada masa kolonial dalam memberikan hak yang sama dengan warga Melayu yang kemudian mengakibatkan orang India menanggung "Apartheid" hingga dengan sekarang.

Adapun sebelumnya HINDRAF telah dengan apik merangkai proses negosiasi yang terkerangka di antaranya diawali pada Juni 2007 dimana para partisipan HINDRAF menyelenggarakan pertemuan damai untuk mengajukan memorandum kepada Jaksa Agung Malaysia atas klaim gagalnya konstitusi menindaklanjuti banyak surat, memorandum, dan laporan kepolisian terkait pembongkaran ilegal 79 candi dari bulan Februari 2006 hingga Juni 2007. Selanjutnya, HINDRAF pada tanggal 12 Agustus 2007 melakukan penyerahan 18 poin memorandum kepada mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Inti dari memorandum yang disusun setelah forum Juli 2007 di antaranya adalah mengakhiri 50 tahun pelanggaran Konstitusi Federal Malaysia tentang persamaan hak bagi warga negara sah, mengakhiri ekstrimisme Islam, dan keistimewaan Melayu oleh konstitusi dan seruan tindakan afirmatif bagi semua orang Malaysia terutama minoritas India.

Kemudian berlanjut pada bulan September hingga November HINDRAF menggelar kampanye dengan *headline* forum kesadaran yang sekali lagi menyoroti penderitaan orang India Malaysia dengan tujuan memotivasi dan melibatkan masa yang lebih besar agar bertindak secara kolektif dan menuntut hak-haknya sebagai warga negara yang setara. Media informasi didistribusikan dalam bentuk teks, visual, audio, dan cetak melalui situs web HINDRAF (PWM). Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2007, Pemerintah dan Majelis Bandaraya Shah Alam (MBSA) kembali melanjutkan pembongkaran kuil Hindu Marriaman di Padang Jawa yang semakin memperburuk situasi. Sehingga kurang dari dua bulan kemudian pecalah protes pada

tanggal 10 November dengan setidaknya bersama 40.000 partisipan dan menjadi demonstrasi terbesar di Kuala Lumpur sejak reformasi.

Pada saat munculnya reaksi-reaksi media terhadap banyak kasus penghancuran kuil dan klaim pelanggaran kebebasan beragama inilah yang akhirnya menumbuhkan kesadaran orang-orang dan banyak bersimpati kepada HINDRAF atas pengakuan dan legitimasi badan internasional. Dukungan dalam skala yang lebih luas dibuktikan dengan keterlibatan *International Commission of Jurists* (ICJ) yang berbasis di Jenewa, anggota parlemen di Inggris, *Lawyers Association* (CLA) yang berbasis di London, pemerintah nasional India, dan Yayasan Hindu Amerika yang meminta dukungan dan mengkritik upaya pemerintah. Ledakan kemarahan masa ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari beberapa peristiwa yang tidak bisa dibendung lagi bagi komunitas India. Gerakan masa muncul erat kaitannya dengan perjuangan untuk melindungi hak-hak-hak orang India Malaysia yang terdistraksi dari segala arah. Pada sepuluh hari sebelum reli HINDRAF digelar, HINDRAF telah mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Perdana Menteri Inggris *Gordon Brown* atas beberapa tuntutan dan keluhan di antaranya ialah, meliputi pembongkaran tempat ibadah Hindu, penolakan pemerintah UMNO untuk mengadakan penyelidikan atas “*mini genocide*” Kampung Medan pada Maret 2001 ketika sekitar 100 orang India dibunuh dan tidak memiliki izin kepolisian untuk menyelidiki dalam tataran yang lebih tinggi. Pada Desember tahun 2005, Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan bahwa ia tidak memiliki yurisdiksi terhadap kasus Malaysia Everest yang menyangkut pemakaman meninggalnya mantan tentara Malaysia dalam pendakiannya pada tahun 1997 yang dipercayai masih beragama Hindu namun kemudian diadili secara mutlak oleh hukum yang berbasis syariah Islam dikarenakan bukti bahwa ia telah masuk agama Islam sebelumnya.

Para politisi kemudian megembar-gemborkan pemilihan tahun ini sebagai titik balik dalam politik etnis Malaysia sehingga HINDRAF secara tidak langsung memiliki legitimasi dukungan dari basis masa pasca pemilu. Dengan semua kompleksitas yang ada, HINDRAF dinyatakan ilegal dan dilarang oleh pemerintah Malaysia pada tanggal 16 Oktober 2008. Keberhasilan HINDRAF dalam mengorganisir unjuk rasa masal ini dapat dilihat dari upayanya dalam menyatukan kelas bawah dan kelas menengah India kota sebagai satu-kesatuan identitas dalam jangkauan yang lebih luas. Fenomena ini adalah hasil dari akumulasi tentang bagaimana hak kolektif yang menjadi kebutuhan setiap individu telah gagal dicitrakan secara publik dalam jangka waktu yang lama, sehingga memunculkan sebuah gerakan masa dengan tujuan pengakuan secara politik. HINDRAF bergerak untuk memperluas mobilisasi dengan menggeser fokus awalnya pada identitas etno-religius dan hak-hak Hindu menjadi penggabungan beberapa masalah di bawah identitas formal orang India. Di luar kontroversi suku-agama, HINDRAF menekankan masalah sosial-ekonomi kelas bawah India dalam 18 poin memorandum. Sehingga secara tidak langsung HINDRAF telah mengaktifkan semua segmen pemilih India terutama pada kalangan yang tidak berpengaruh dalam mencapai dukungan yang lebih banyak hingga berpengaruh pada kekalahan Barisan Nasional pada pemilu tahun 2008.

Sedangkan di sisi lain, HINDRAF berhasil mendorong Perdana Menteri Najib Razak dalam menggantikan Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2009 untuk menjangkau langsung masyarakat India dengan slogan “*Nambikei*” (Percaya dalam

bahasa Tamil) dan program “1Malaysia” yang dipercaya dapat memberikan suasana harmoni dalam keberagaman etnis Malaysia. HINDRAF juga menerima sejumlah besar hibah dan pendanaan yang didirikan dan ditempatkan dengan badan-badan baru, seperti Pengembangan Sosial-Ekonomi Komunitas India langsung dibawah kendali Departemen Perdana Menteri. Najib juga berjanji untuk menangani secara pribadi masalah India lainnya, mulai dari kesejahteraan sekolah-sekolah Tamil hingga masalah catatan kewarganegaraan orang India tanpa bukti dokumentasi resmi. Sedangkan upaya Najib dalam merayu organisasi India, terutama organisasi etno-linguistik dan etno-kasta adalah sikap eksplisit bahwaia dengan mudah mendapatkan loyalitas dalam menjangkau suara orang-orang India pada umumnya.

Pada kondisi ini HINDRAF sebagai representatif kelompok minoritas India telah bertransformasi menjadi kelompok orientasi sosial budaya menempuh jalan baru yakni sistem politik berbasis masa dalam mendapatkan rekognisi yang lebih luas dibandingkan dengan hanya sekedar akomodasi bantuan dan dukungan moril semata. Sistem politik telah menjadi sebuah kebutuhan fundamental dalam menciptakan wacana identitas baru dengan tujuan memungkinkan untuk menginterpretasi ulang wajah negara yang sebelumnya dilihat sebagai negara yang dinaturalisasi dengan keberadaan identitas mayoritas.

Singkatnya rangkaian perjuangan HINDRAF yang bermula dari sebuah gerakan sosial hingga berhasil menjadi bagian integral politik oposisi dan secara secara aktif turut memobilisasi pemilihan Malaysia hingga beberapa periode tidak lain merupakan sebuah rangkaian upaya orang-orang India Malaysia dengan tujuan dapat terciptanya keadaan yang harmonis di antara mayoritas Melayu serta membangun integrasi sosial secara utuh. Diakuinya identitas mendasar mereka yang tidak hanya pengakuan *personality* namun juga pada ranah konstitusi dengan bentuk hak yang sama dengan warga Melayu.

## **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi diaspora dalam kekerasan nasional dan transnasional pada dasarnya adalah perdebatan tentang identitas. Dalam kondisi ini HINDRAF sebagai representatif kelompok minoritas India telah bertransformasi menjadi kelompok orientasi sosial budaya menempuh jalan baru yakni sistem politik berbasis masa dalam mendapatkan rekognisi yang lebih luas dibandingkan dengan hanya sekedar akomodasi bantuan dan dukungan moril semata. Sistem politik telah menjadi sebuah kebutuhan fundamental dalam menciptakan wacana identitas baru dengan tujuan memungkinkan untuk menginterpretasi ulang wajah negara yang sebelumnya dilihat sebagai negara yang dinaturalisasi dengan keberadaan identitas mayoritas.

Sejatinya antusiasme pergantian rezim setelah lebih dari 60 tahun serta dukungan dan optimisme komunitas India Malaysia telah dibuktikan dengan mewakili aspirasi masa depan mereka kepada partai politik multiras. Pandangan orang-orang India Malaysia bahwa pemerintah Pakatan Harapan dapat mengubah sikap dan praktik yang mengakar pada kelembagaan pemerintahan adalah benar adanya. Hal ini terlihat dimana upaya HINDRAF dalam mendapatkan rekognisi dan mendapatkan perlakuan yang adil terhadap budaya Hindu mereka tidaklah mudah. Namun demikian tidak dinafikkan bahwa semangat dan komitmen para pemimpin

HINDRAF untuk kesejahteraan komunitas India Malaysia sangatlah tinggi. Hanya saja, kemampuan mereka dalam mengumpulkan semangat identitas tanah India yang terfragmentasi menjadi satu-kesatuan politik yang berkelanjutan telah gagal dalam kondisi celah yang kritis. Konflik internal politik dan, mobilisasi politik tambal sulam serta sikap kompromi dalam hal memberi dan menerima kekuasaan dalam koalisi multietnis telah menciptakan tantangan yang besar dalam mengamankan semua hak istimewa yang seharusnya dimiliki oleh komunitas India Malaysia yang pada akhirnya membuat mosi tidak percaya dan perpecahan persepsi yang parah.

## REFERENSI

- Albury, N. J. (2018). Forging and negating diasporic linguistic citizenship in ethnocratic Malaysia. *Lingua*. <https://doi.org/10.1016/j.lingua.2018.08.003>
- Cangià, F. (2014). The Hindu Rights Action Force and the Definition of the "Indian Community" in Malaysia. *Sociological Research Online*, 19(4), 1–14. <https://doi.org/10.5153/sro.3474>
- Coulthard, G. S. (2007). Subjects of Empire: Indigenous Peoples and the 'Politics of Recognition' in Canada. *Contemporary Political Theory*, 6(4), 437–460. <https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300307>
- Fong, Y. L., & Ishak, M. S. A. (2014). Framing interethnic conflict in Malaysia: A comparative analysis of newspapers coverage on the keris polemics. *Ethnicities*, 14(2), 252–278. <https://doi.org/10.1177/1468796813482310>
- Kananatu, T. (2018). The politico-legal mobilisation of ethnic Indians before Malaysia's 2018 election. *Round Table*, 107(6), 703–716. <https://doi.org/10.1080/00358533.2018.1545938>
- Kaur, A. (2011). *From Independence to HINDRAF The Malaysian Indian Community and the negotiation for minority*. 2.
- Kaur, A. (2018). *The Hindu Rights Action Force and the Malaysian Indian minority after the 2018 general election in Malaysia*. 319, 19.
- Leong, S. (2009). The HINDRAF Saga: media and citizenship in Malaysia. *Communication, Creativity and Global Citizenship: Refereed Proceedings of the Australian and New Zealand Communications Association Annual Conference, July*, 466–484. <http://eprints.qut.edu.au/34474/>
- Leong, S. (2013). New media and the nation in Malaysia: Malaysianet. *New Media and the Nation in Malaysia: Malaysianet*, 1–167. <https://doi.org/10.4324/9781315886589>
- No Title. (2017). 4(1), 1–11.
- Prabowo, R. A. (2019). Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 75. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5379>
- Rathina Pandi, A. (2014). Insurgent space in Malaysia: HINDRAF movement, new media and minority Indians. *International Development Planning Review*, 36(1), 73–90. <https://doi.org/10.3828/idpr.2014.5>
- Rusmanto, J. (2012). *GERAKAN SOSIAL, Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahan* (Issue December 2012). [https://www.researchgate.net/publication/323238283\\_GERAKAN\\_SOSIAL\\_Sejarah\\_Perkembangan\\_Teori\\_antara\\_Kekuatan\\_dan\\_Kelemahan](https://www.researchgate.net/publication/323238283_GERAKAN_SOSIAL_Sejarah_Perkembangan_Teori_antara_Kekuatan_dan_Kelemahan)
- Rusmanto, J., & Raya, U. P. (2018). *GERAKAN SOSIAL, Sejarah Perkembangan Teori*

*antara Kekuatan dan Kelemahan* (Issue December 2012).

- Schaeffer, R. (2017). No Title صحیح البخاري. ی, ی(ی), ی.
- Singh, A. (2014). Indian Diaspora as a factor in India–Malaysia relations. *Diaspora Studies*, 7(2), 130–140. <https://doi.org/10.1080/09739572.2014.911447>
- Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*.
- Taylor, C. (2004). The politics of recognition. *Contemporary Political Theory: A Reader*, 269–281. <https://doi.org/10.4135/9781446215272.n30>
- Wattimena, R. A. . (2011). MENUJU INDONESIA YANG BERMAKNA: Analisis Tekstual-Empiris terhadap Pemikiran Charles Taylor tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme, serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 11(1), 1–30.
- Adamson, Fiona B. (2008). Constructing the Diaspora: Diaspora Identity Politics and Transnational Social Movements. San Francisco, March 28-29.
- Brinkerhoff, Jennifer M. (2008). Diaspora Identity and The Potential for Violence: Toward an Identity-Mobilization Framework, *Identity: An International Journal of Theory and Research*, 8:1, 67-88.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arakaki, Robert K. “2008 Malaysian Election: The End of Malaysia’s Ethnic Nationalism?”, *Asian Politic and Policy*, Vol.1, Number 1, Pages 79-96.
- Gaspersz, Steve G. Chr. “Masuk Melayu: Menegosiasikan Islam dan Kemelayuan Malaysia”, *Civic Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, Hal. 01-09.
- Muslimah, S. 2107. “Integrasi Etnis India Pasca Penetapan Kebijakan 1Malaysia Policy”, *JOM FISIP*, Vol. 4, No. 1
- Noor, Farish A. 2008. “Malaysian Hindu Rights Action Force (HINDRAF) Communitarianism across borders?”. Singapore S. Rajaratnam School of International Studies: Singapore.